

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi yang paling tinggi kedudukannya dan juga mencakup pengertian yang paling luas. Negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya, sementara itu pemerintah hanyalah sekedar agen yang melaksanakan kebijakan dalam sebuah masyarakat. Agar suatu negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ada salah satu unsur dari negara yang disebut dengan pemerintah. Pemerintah berfungsi untuk membantu melaksanakan tujuan negara, agar kelak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat.¹

Setiap negara berdiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap negara juga memiliki tujuan yang masing-masing berbeda pastinya, ada yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh Nicolo Machiavelli, dan ada juga yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran baik untuk negara, rakyat, sampai individu. Ketiga hal tersebut harus tercapai karena semuanya saling berhubungan satu sama lain.²

Sebuah negara memiliki pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Keputusan-keputusan yang dibuat ini berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan turunan lainnya. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah bertindak mengatasnamakan negara. Yang membedakan pemerintah dengan negara adalah jika negara mencakup keseluruhan penduduk, maka pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Selain itu pemerintah sering berubah (terutama di negara demokrasi), sedangkan negara terus bertahan (kecuali dicaplok oleh negara lain). Kekuasaan pemerintah juga biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³

Setiap negara memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik ini meliputi penduduk, budaya, teknologi, hingga keragaman sumber daya alam di setiap negara. Ada negara yang miskin

¹ Arief Budiman, *Teori Negara* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 84

² Marpaung, Lintje Anna, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 35

³ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi.* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008)hlm.53-54

dari sumber daya alam, seperti Jepang , Korea, dan Singapura misalnya. Umumnya negara-negara tersebut dapat mengalami kemajuan karena kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Ada juga negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti Indonesia, Venezuela, dan Brazil misalnya. Pada setiap negara juga memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah yang luas memiliki salah satu sumber daya alam yang paling berharga, yaitu minyak bumi. Sebagai salah satu negara produsen minyak bumi terbesar di dunia, Indonesia tergabung ke dalam organisasi OPEC atau *Organization of the Petroleum Exporting Countries* sejak 1962.⁴ Tercatat sejak tahun 1996 hingga tahun 2020, tingkat produksi minyak bumi Indonesia rata-rata mencapai angka di atas 250.000,00 barrel.⁵

Tercatat, Indonesia telah 2 (dua) kali mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC yakni pada tahun 2008 dan 2016. Adapun alasan Indonesia mengundurkan diri pada kedua tahun tersebut karena cadangan minyak Indonesia yang telah menurun drastis dan struktur APBN untuk subsidi BBM yang melebihi batas yang ditetapkan sehingga tidak memungkinkan lagi Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan ekspor minyak bumi dengan jumlah yang sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh OPEC⁶ . Indonesia yang tadinya negara eksportir minyak bumi malah berubah menjadi negara importir minyak bumi. Hal itu pun mulai menimbulkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah kenaikan harga BBM di dalam negeri.

Tercatat selama era pemerintahan SBY, harga BBM mengalami kenaikan sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing terjadi pada Maret 2005, Oktober 2005, Mei 2008, dan kenaikan terakhir terjadi pada Juni 2013. Pada bulan Maret 2005, kenaikan BBM terjadi pada jenis Premium dari Rp. 1.810 per liter menjadi Rp. 2.400 per liter dan jenis Solar dari Rp. 1.650 per liter menjadi Rp. 2.100 per liter. Pada bulan Oktober 2005 terjadi kenaikan kedua, dimana Premium mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.500 per liter dan Solar menjadi Rp. 4.300 per liter. Pada Mei 2008, harga BBM mengalami kenaikan yang lebih drastis dimana Premium naik menjadi Rp. 6.000 per liter dan Solar menjadi Rp. 5.500 per liter. Terakhir, menuju masa akhir kepemimpinan SBY harga

⁴ Isna Rifka, "Mengapa Indonesia Keluar Dari OPEC?", KOMPAS.Com, 15 Februari 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/02/15/063900026/mengapa-indonesia-keluar-dari-opec-?>

⁵ *Data dikutip dari laman Badan Pusat Statistik (BPS), "Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam, 1996-2020"*, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/06/15/1092/produksi-minyak-bumi-dan-gas-alam-1996-2020.html>

BBM kembali mengalami kenaikan pada jenis Premium menjadi Rp. 6.500 per liter sedangkan jenis Solar tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan harga.⁷

Pada tabel di bawah ini merupakan harga BBM di periode kedua pemerintahan SBY sesuai dengan fokus periode penelitian oleh penulis. Pada tabel ini khususnya disajikan harga BBM setelah mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjelang akhir pemerintahan SBY.

Tabel 1. Harga BBM di Periode Kedua Pemerintahan SBY (2009-2014)

Jenis BBM	Sebelum Kenaikan	Sesudah Kenaikan	Selisih Harga
Premium	Rp. 6.000,00 per liter	Rp. 6.500,00 per liter	Rp. 500,00
Solar	Rp. 5.500,00 per liter	Rp. 5.500,00 per liter	-

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa terjadi kenaikan pada bahan bakar jenis Premium dari Rp. 6.000,00 menjadi Rp. 6.500,00 dengan selisih Rp. 500,00 dari harga pada periode pertama pemerintahannya. Sedangkan untuk bahan bakar jenis Solar tidak mengalami kenaikan maupun penurunan harga.

Perihal kenaikan harga BBM pada tahun 2013 di era pemerintahan SBY, beliau menjelaskan bahwa pada tahun tersebut situasi perekonomian global mengalami kekacauan, hal ini menimbulkan dampak ketidakpastian ekonomi pada berbagai negara secara langsung maupun tidak langsung. Embargo minyak bumi Iran kepada Prancis dan Inggris juga menjadi salah satu faktor yang menambah permasalahan ekonomi dunia. Sehingga memaksa pemerintah Indonesia saat itu untuk menyesuaikan dengan salah satunya adalah menaikkan harga BBM demi memperbaiki stuktur APBN yang dinilai sudah tidak mampu menopang perekonomian negara. Setidaknya itulah penyebab mengapa dapat terjadi kenaikan harga BBM di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.⁸

⁷ Afiffah Nurdifa, "Perbandingan Kebijakan Harga BBM di Era Jokowi dan SBY", *Bisnis.com*, 4 September 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220904/44/1573878/perbandingan-kebijakan-harga-bbm-di-era-jokowi-dan-sby>

⁸ detik Finance, "Ini Dia Alasan SBY Soal Kenaikan Harga BBM", *detik.com*, 22 Februari 2012, <https://finance.detik.com/energi/d-1849227/ini-dia-alasan-sby-soal-kenaikan-harga-bbm>

Fenomena kenaikan harga BBM di Indonesia secara luas terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan masa pemerintahan Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, kenaikan BBM ini juga tak lepas dari kenaikan harga minyak bumi di dunia dan membengkaknya anggaran subsidi BBM. Pada tahun 2022, Jokowi kembali mengumumkan kenaikan harga BBM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Harga BBM di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi (2019-2024)

Jenis BBM	Sebelum Kenaikan	Sesudah Kenaikan	Selisih Harga
Pertalite	Rp. 7.650,00 per liter	Rp. 10.000,00 per liter	Rp. 2.350,00
Solar	Rp. 5.150,00 per liter	Rp. 6.800,00 per liter	Rp. 1.650,00
Pertamax	Rp. 12.500,00 per liter	Rp. 14.500,00 per liter	Rp. 2.000,00

Dalam masa pemerintahan Jokowi, diperkenalkan jenis bahan bakar baru sebagai pengganti Premium yaitu Pertalite. Pada tabel di atas menunjukkan harga bahan bakar jenis Pertalite yang mengalami kenaikan dari awalnya Rp. 7.650,00 menjadi Rp. 10.000,00, lalu ada bahan bakar jenis Pertamax yang mengalami kenaikan Rp. 1.650,00 dari harga awalnya, serta bahan bakar jenis Solar mengalami kenaikan menjadi Rp. 6.800,00 dari harga sebelumnya Rp. 5.150,00.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah membengkak 3 (tiga) kali lipat dari Rp. 152,5 Triliun menjadi Rp. 502,4 Triliun. Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa sebanyak 70% subsidi BBM malah dinikmati oleh masyarakat yang secara ekonomi mampu. Sehingga subsidi BBM ini tidak sesuai dengan target awal yaitu masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kurang mampu.⁹

Dapat dilihat bahwa kedua pemerintahan baik SBY maupun Jokowi menghadapi permasalahan fenomena yang sama yaitu kenaikan harga BBM. Reaksi publik mengenai fenomena ini juga memiliki kesamaan yaitu bersifat menentang atau mengkritik pemerintah agar bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut dengan menurunkan kembali harga BBM. Tercatat pada masa pemerintahan SBY ketika sedang dilanda kenaikan harga BBM terjadi rangkaian demonstrasi yang

⁹ Fitria Farissa, "Jejak Kenaikan Harga BBM di Era Pemerintahan Jokowi", KOMPAS.com, 3 September 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/03/19593621/jejak-kenaikan-harga-bbm-di-era-pemerintahan-jokowi>

puncaknya terjadi pada tahun 2012 ketika ribuan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, buruh, petani, PKL, dan nelayan dari seluruh Indonesia berkumpul di Istana Negara membawa tiga tuntutan dimana salah satunya adalah menuntut pemerintah untuk menurunkan kembali harga BBM. Sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi, demonstrasi besar terkait kenaikan harga BBM baru terjadi pada tahun 2022 dimana massa aksi juga terdiri dari mahasiswa, buruh tani, dan nelayan turun ke jalan dengan membawa tuntutan yang dapat dibilang sama.

Adapun yang membedakan antara pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi dalam konteks ini adalah pola komunikasi politik yang digunakan dalam menanggapi fenomena kenaikan harga BBM ini. Dalam konteks ini juga, terdapat perbedaan situasi penolakan berupa demonstrasi kenaikan BBM antara era pemerintahan SBY dan era pemerintahan Jokowi. Faktor utamanya terletak pada perbedaan regulasi yang mendasari penentuan harga BBM pada era SBY dan era Jokowi. Perbedaan regulasi itu adalah penghapusan keterlibatan DPR dalam penentuan harga BBM. Dapat dilihat pada era pemerintahan SBY, peran DPR sebagai lembaga legislatif sangat kuat sehingga pemerintah tidak bisa asal menaikkan harga BBM. Saat ini DPR sebagai legislatif hanya dimintai pertimbangannya, sementara keputusan final tetap berada di tangan pemerintah.¹⁰

Dunia politik sering kali identik dengan apa yang namanya aktor atau tokoh politik. Aktor atau tokoh politik ini selalu mendapatkan sorotan dari media massa ketika menyampaikan pendapatnya mengenai suatu isu yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika presiden Jokowi dalam pidatonya dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI-AD di Istana Bogor pada tanggal 5 Agustus mengatakan "Bayangkan Peralite naik dari Rp7.650 harga sekarang, kemudian jadi harga yang bener Rp 17.100, demonya berapa bulan?". Hal ini mengundang banyak komentar netizen di media sosial terhadap pernyataan tersebut. Komentar tersebut pun juga beragam, ada yang menyetujui dengan menunjukkan dukungan serta simpatinya ada juga yang mengkritisi kinerja pemerintahan sehingga kenaikan itu bisa terjadi.

Berbagai reaksi dari masyarakat kepada aktor atau tokoh politik itu bergantung pada gaya komunikasi politik aktor atau tokoh tersebut. Indonesia sejak masa reformasi telah dipimpin oleh

¹⁰ Andrian Taher, "Beda Reaksi Publik Era Jokowi & SBY soal Kenaikan Harga BBM Subsidi", tirtto.id, 13 September 2022, <https://tirtto.id/beda-reaksi-publik-era-jokowi-sby-soal-kenaikan-harga-bbm-subsidi-gv9i>

5 (lima) presiden dimulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan sekarang ini Joko Widodo (Jokowi). Masing-masing presiden memiliki gaya komunikasinya tersendiri yang khas dalam menyikapi suatu isu di kalangan masyarakat, menanggapi kritik, dan menghadapi reaksi masyarakat terhadap kebijakan publik. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing-masing presiden berupa pola komunikasi politik yang digunakan.

Komunikasi politik itu sendiri merupakan penyampaian pesan dari komunikator (sumber) terhadap komunikan (target) untuk mencapai tujuan politik yang diharapkan oleh komunikator. Dalam komunikasi politik, yang dimaksud dengan komunikator politik adalah individu-individu yang berada dalam suatu organisasi atau institusi yang dapat berupa lembaga pemerintahan, partai politik, media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik tidak hanya pada individu saja, namun bisa juga berupa negara, organisasi internasional, dan lain-lain. Sehingga komunikator politik adalah individu atau sekelompok individu yang menyampaikan pesan yang berkaitan dengan segala urusan kekuasaan dan kebijakan (politik) yang bertujuan untuk memengaruhi masyarakat.

Dan Nimmo membagi komunikator politik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu politikus, profesional, dan aktivis. Politikus itu sendiri adalah individu yang memegang jabatan di pemerintahan baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Politikus memiliki pengaruh signifikan terhadap pembuatan kebijakan, alokasi anggaran, gejolak sosial, dan terutama pada pembentukan opini di kalangan masyarakat. Politisi itu sendiri juga masih terbagi menjadi 2 (dua), yaitu politisi ideologis dan politisi partisan. Politisi ideologis adalah politisi yang cenderung sebagai pemikir, yang sering kali tampil di hadapan publik dengan menjual ide dan pemikirannya untuk bangsa dan negara. Sedangkan politisi partisan adalah politisi praktis, atau politisi yang merupakan anggota dari sebuah partai politik seperti yang sering dilihat di media massa dan pemerintahan.¹¹

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden Republik Indonesia ke-6 yang menjabat selama dua periode kepemimpinan (2004-2009 dan 2009-2014). Begitu juga dengan Joko Widodo yang merupakan presiden Republik Indonesia ke-7 yang menjabat selama dua periode kepemimpinan (2014-2019 dan 2019-2024). Kedua tokoh pemimpin negara Indonesia ini

¹¹ Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

selama masa kepemimpinannya tentu sering mengeluarkan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan negara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa SBY dan Jokowi adalah tokoh komunikator politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pola komunikasi politik SBY dan Jokowi dalam menyikapi fenomena kenaikan harga BBM sebagai komunikator politik di era pemerintahannya masing-masing khususnya pada periode kedua pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, dalam penelitian ini akan merumuskan pertanyaan yang menjadi dasar permasalahan yang ingin diuraikan sebagai berikut

1. Bagaimana pola komunikasi politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Joko Widodo dalam menyikapi fenomena kenaikan harga BBM pada periode kedua pemerintahannya masing-masing?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menemukan perbedaan pola komunikasi politik dari pemerintahan yang dipimpin oleh SBY dan pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi dalam menyikapi fenomena kenaikan BBM yang juga terjadi pada kedua era pemerintahan SBY maupun Jokowi. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada reaksi kedua pemerintahan yang salah satunya berupa mengirimkan pesan-pesan politik kepada masyarakat dalam upaya menangani fenomena kenaikan BBM yang kerap menjadi permasalahan dan gejolak baik di tubuh pemerintahan maupun di kalangan masyarakat.

Adapun dengan ditemukannya rumusan masalah penelitian di atas, yang akan menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mencari tahu perbedaan pola komunikasi politik era pemerintahan SBY dan era pemerintahan Jokowi dalam menyikapi fenomena kenaikan harga BBM di era pemerintahannya masing-masing.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu penambah wawasan dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan komunikasi politik serta dapat menjadi wadah untuk mahasiswa jurusan ilmu politik universitas nasional dalam proses belajar yang meliputi pengembangan pemahaman, penalaran, dan menempa pengalaman.

2. Secara kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian dengan topik yang sama lebih lanjut lagi, yaitu tentang bagaimana pola komunikasi politik pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi dalam menanggapi fenomena kenaikan BBM sebagai isu utama di kalangan masyarakat, yang dimana bisa saja menemukan perspektif baru untuk di analisa yang dapat berguna bagi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, serta Universitas Nasional.

3. Bagi masyarakat, secara khususnya mahasiswa dan civitas akademik melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan dalam proses belajar dan pengembangan diri.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing terkait satu sama lain secara sistematis. Adapun sistematik penulisannya adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan bagian awal pembuka yang akan menguraikan mengenai: latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang selanjutnya akan dilakukan kajian menggunakan metodologi penelitian sebagai penjelasan teknik penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II merupakan bagian kedua penelitian skripsi Perbandingan Pola komunikasi politik yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori dan konsep yang relevan untuk menganalisis latar belakang masalah yang ada. Ada pun beberapa teori dan konsep yang penulis gunakan pada penulisan penelitian skripsi Perbandingan Pola komunikasi politik adalah teori Komunikasi Politik dan teori Isu Kebijakan Publik. Pada bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu yang juga menjadi bahan acuan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bagian dari bab ini meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengelolaan dan analisis data yang akan digunakan demi mendapatkan data yang valid.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil dan memaparkan analisa dari proses penelitian pada bab sebelumnya yang diselesaikan dengan menggunakan metode dan teori yang membantu peneliti mendapat informasi sebagai bahan untuk membahas inti dari penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana pola komunikasi politik yang terjadi pada pemerintahan presiden SBY dan presiden Jokowi dalam menyikapi isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat dan pada masa pemerintahannya masing-masing. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini pertama, adalah isu dan permasalahan apa saja yang disikapi oleh kedua presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Kedua, adalah bagaimana pola komunikasi politik pada masing-masing pemerintahan baik SBY maupun Jokowi. Subjek dari penelitian ini adalah pola komunikasi politik dan objek dari penelitian ini adalah pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi.

BAB V KESIMPULAN

Bab V ini menjelaskan bagaimana hasil akhir yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, dimana nantinya kesimpulan akan menjadi hasil akhir yang menjelaskan secara singkat, jelas, dan padat mengenai keseluruhan hasil penelitian, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca nantinya. Di bab ini juga penulis akan menyusun hasil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan maupun di sumber literatur lainnya.